

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu yang ditandai dengan semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor usaha ini (P. I. C. Putra & Purnamawati, 2013). Perekonomian saat ini sudah semakin berkembang pesat dengan adanya perdagangan pada pasar bebas dan dibantunya dengan teknologi yang unggul maka semakin banyak persaingan antar perusahaan baik domestik maupun manca Negara (Purnamawati, 2020). Salah satu yang memiliki persaingan yang kompetitif adalah usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. UMKM mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat (Ni Ketut Sari Adnyani, I Gusti Ayu Purnamawati, 2021). UMKM juga dapat

menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Melalui hal ini terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelaku usaha perorangan. Sektor UMKM sangatlah diperhatikan oleh pemerintah karena mampu mendorong perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan ditingkatkan mengingat perannya yang mampu menyediakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat, berperan dalam meningkatkan pemasukan bagi masyarakat, mampu mewujudkan dalam perekonomian dan mampu menciptakan keseimbangan secara nasional. Khususnya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Peningkatan jumlah UMKM terlihat dari data berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah UMKM dan Usaha Besar di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 s/d 2021**

Klasifikasi Usaha	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
Usaha Mikro	5.114	20.934	5.709	38.961	7.007	40.304
Usaha Kecil	3.481	5.813	3.655	5.921	3.662	5.992
Usaha Menengah	192	4	217	9	225	9
Usaha Besar	17	-	17	-	17	-
<b>Total</b>	<b>8.804</b>	<b>26.751</b>	<b>9.598</b>	<b>44.891</b>	<b>10.911</b>	<b>46.305</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Kabupaten Buleleng, 2022.*

Pertumbuhan UMKM yang terus semakin meningkat tentunya harus diimbangi dengan pengetahuan serta kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan yang disebut dengan literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih terampil dalam mengelola sumber pendapatan serta mengelola keuangan pribadinya. Adanya literasi keuangan yang baik akan turut mendorong tingkat kesejahteraan seseorang dikarenakan akan membuat seseorang akan menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Bagi masyarakat yang ada pada tabel UMKM, literasi keuangan menjadi hal yang seharusnya dimiliki untuk mengembangkan usaha mereka dalam jangka panjang. Pelaku UMKM akan sangat terbantu pengelolaan keuangannya dengan literasi keuangan yang memadai, mulai dari penganggaran, perencanaan simpanan dana perusahaan serta pemahaman dasar keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha. Sebagian besar pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya masih menggunakan tradisional dan belum dilakukan dengan literasi yang baik. Survei Bank Indonesia menyatakan bahwa literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah, yaitu di angka 36% pelaku UMKM yang memahami pentingnya literasi keuangan. Kisaran angka 60%-70% dari seluruh pelaku UMKM belum memiliki pengelolaan keuangan di lembaga keuangan perbankan (Sriani et al. 2022). Tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Bali baru menyentuh angka 38%, sehingga dengan rendahnya tingkat persentase mengenai literasi keuangan nantinya akan berpengaruh pada kinerja UMKM itu sendiri dengan kata lain tujuan dari UMKM itu sendiri kemungkinan belum tercapai dengan

baik (Suardana & Musmini, 2020). Melalui gambaran ini dapat diartikan bahwa literasi keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng juga masih rendah.

Di Kabupaten Buleleng pengetahuan mengenai literasi keuangan yang dimiliki usaha mikro masih rendah meskipun mereka menganggap bahwa literasi keuangan itu penting untuk keberlanjutan usaha yang mereka jalani. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara ke beberapa pemilik usaha mikro di Buleleng. Pengetahuan mereka mengenai penyusunan laporan keuangan masih rendah karena mereka tidak mengetahui SAK yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan usaha mereka, meskipun sebagian besar dari pemilik usaha ini sudah membuat laporan laba rugi namun masih tradisional yang hanya berisi informasi pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya.

Selain literasi keuangan hal yang tidak kalah penting dalam mengembangkan UMKM adalah inovasi dari pemilik UMKM itu sendiri. Inovasi kewirausahaan berkaitan dengan pengembangan produk baru, yang bersifat informal dan diperlukan struktur. Fase inovasi yang dikelola berkaitan dengan efisiensi biaya melalui peningkatan proses. Ketika UMKM mampu menerapkan strategi inovasi dan literasi keuangan, diharapkan mereka mampu menyusun strategi bisnis agar nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi persaingan. Perusahaan harus mampu memilih dan menetapkan strategi inovasi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan dan keinginan pasar dengan fluktuasi permintaan yang tidak menentu demi meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik (Pratama, 2021). Di Kabupaten Buleleng belum adanya inovasi yang signifikan terkait dengan penyediaan tempat pusat pemasaran produk UMKM (sejenis pusat pasar oleh-

oleh) dan kemampuan terkait *branding* produk. Selama ini kemampuan *branding* relatif terabaikan, karena ada kecenderungan pelaku UMKM lebih fokus dalam kegiatan produksi (Balitbang, 2022). Perlunya peningkatan dan inovasi yang berkelanjutan sebagai sumber utama keunggulan kompetitif bagi organisasi. Lingkungan kompetitif saat ini, tantangan bagi semua bisnis termasuk UMKM tidak hanya untuk berinovasi di pasar yang ada untuk bertahan dan tetap menguntungkan, tetapi juga untuk berinovasi di pasar baru agar tetap dapat bersaing. Penelitian ini berfokus pada inovasi produk dan inovasi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM. Inovasi pemasaran/promosi produk yang bisa dilakukan UMKM di era ini bisa menggunakan langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media sosial.

Inklusi keuangan juga berperan penting dalam pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan inklusi keuangan merupakan komponen penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kenyataannya pengusaha masih banyak mengalami kendala dalam perkembangannya bahkan mempertahankan usahanya, salah satu faktornya yaitu akses permodalan yang masih terbatas. Hambatan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan adalah tingginya persyaratan dari bank yang terkadang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha dan juga karena kesenjangan kemiskinan, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen pelaku UMKM, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan, hal inilah yang menyebabkan inklusi keuangan penting untuk diterapkan (Hilmawati, 2021). Akses pada sumber pembiayaan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan bisnis, karena proses keuangan adalah jantung dari setiap perusahaan tidak peduli seberapa

baik pengelolaannya. Perusahaan tidak dapat bertahan hidup tanpa dana yang cukup untuk kebutuhan akan modal kerja, investasi aset tetap, penempatan tenaga kerja terampil dan pengembangan pasar dan produk baru serta ketersediaan keuangan. Maka mutlak diperlukan bantuan modal usaha dari lembaga keuangan. Namun pada kenyataannya, akses pengusaha terhadap lembaga keuangan masih rendah. Mulai dari masalah jarak dan wilayah, masalah sosial dan masalah pribadi yang berpotensi menjadi penghalang utama akses keuangan bagi masyarakat. Selain itu, rendahnya permintaan akan layanan keuangan dan ketiadaan akses untuk masyarakat menjadi masalah lainnya pada inklusi keuangan (Sohilauw, 2018). Jika UMKM memiliki akses permodalan/keuangan atau tidak adanya hambatan dalam memperoleh modal maka UMKM akan bisa meningkatkan penjualan atau laba dimana peningkatan modal merupakan salah satu indikator peningkatan kinerja.

Sejak adanya Covid-19, keberlangsungan hidup UMKM menjadi terancam dan dapat membahayakan perekonomian Nasional. Adanya Pemerintah berupaya untuk mengatasi hal yang sedang membahayakan perekonomian Nasional salah satunya dengan cara mencanangkan program bantuan untuk pelaku usaha mikro dengan tujuan untuk menjaga dan membantu keberlangsungan hidup usaha mikro dalam menghadapi tekanan akibat ini dan sebagai bentuk penyelamatan ekonomi Nasional (Mustofa, 2021).

Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha

mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BPUM ini diberikan untuk menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi Indonesia akibat Covid-19 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional serta sebagai bentuk penyelamatan ekonomi. Program BPUM ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp. 1.200.000 pada tahun 2021. Total dana BPUM untuk Provinsi Bali pada tahun 2021 sebesar 287 miliar yang disalurkan kepada 239.469 unit usaha di Bali melalui Bank Rakyat Indonesia (Merdeka.com, 2021).

Program bantuan BPUM pada kenyataannya di lapangan menuai banyak problematika seperti tidak tepatnya sasaran pemerintah dimana bantuan ini untuk pelaku usaha mikro akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memperoleh bantuan ini tetapi tidak mempunyai usaha. Banyak masyarakat yang benar-benar mempunyai usaha tetapi tidak mendapatkan dan pelaku usaha yang mendapat program bantuan ini tidak benar-benar membelanjakan untuk menjalankan usahanya, akan tetapi masih menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, tidak adanya sosialisasi dari pihak Kementerian Koperasi kepada calon penerima bantuan ini, sehingga masyarakat tidak terlalu memahami dan mengerti terkait program bantuan ini. Dimana, dengan adanya sosialisasi tersebut sangat penting mengingat supaya masyarakat mengetahui serta mengerti secara keseluruhan tujuan pemerintah dalam mencanangkan program bantuan. Ketiga, tidak adanya pemantauan dari pihak terkait setelah menerima program bantuan ini (Mustofa, 2021).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Pulau Bali yaitu 1.366 km<sup>2</sup> yang diasumsikan memiliki pelaku UMKM cukup banyak. Kenyataannya meskipun usaha mikro di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seperti yang ada pada tabel di atas, pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng tergolong masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM Kabupaten Buleleng masih menduduki posisi ketiga tertinggi di Bali. Hal ini tentu menjadi masalah apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Contohnya saja Kabupaten Gianyar dengan luas daerah yang lebih kecil hanya 368 km<sup>2</sup> dari Kabupaten Buleleng namun dapat menduduki posisi pertama sebagai pelaku UMKM terbanyak di Bali.

**Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019 s/d 2021**

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Buleleng	34.552	34.374	54.489
2	Jembrana	27.654	24.346	46.277
3	Tabanan	41.459	42.744	43.715
4	Badung	19.688	19.261	22.647
5	Denpasar	31.826	32.026	32.224
6	Gianyar	75.412	75.482	75.542
7	Bangli	44.068	44.068	44.123
8	Klungkung	11.761	14.584	35.792
9	Karangasem	39.589	40.468	57.456
<b>Jumlah</b>		<b>326.009</b>	<b>327.353</b>	<b>412.265</b>

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali, 2022.*

Peningkatan perkembangan usaha mikro masih belum dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini terlihat dari tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Bali baru menyentuh angka 38%, sehingga dengan rendahnya tingkat persentase mengenai literasi keuangan nantinya akan berpengaruh pada kinerja UMKM itu sendiri dengan kata lain tujuan dari UMKM itu sendiri kemungkinan belum tercapai dengan baik (Suardana & Musmini, 2020). Adanya pandemi Covid 19 juga menambah masalah baru bagi UMKM di Kabupaten Buleleng dan merasakan dampaknya yang membuat kinerja usaha mikro menurun. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi ini meliputi 5 aspek yakni 1) Aspek penjualan. Rata-rata penurunan penjualan UMKM sebesar 61%, 2) Aspek laba usaha. Rata-rata penurunan laba usaha sebesar 61%, 3) Aspek permodalan. Jumlah UMKM yang mengalami permasalahan modal meningkat menjadi 71,4%, 4) Aspek jumlah karyawan. Aspek ini, UMKM melakukan pengurangan jumlah karyawan sebesar 22%, dan 5) Aspek kemampuan pembayaran angsuran bank. Hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan (Balitbang Kab. Buleleng, 2021).

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara kuantitatif mengenai fenomena kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng yang belum optimal meskipun dari pemerintah sudah memberikan bantuan berupa dana BPUM untuk membantu usaha-usaha mikro di Kabupaten Buleleng. Penelitian kali ini penulis mengambil cakupan daerah yang lebih luas daripada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian

sebelumnya hanya mencakup kecamatan saja. Secara parsial efektivitas penggunaan dana BPUM, penggunaan *software* akuntansi, dan *human capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro (Malini & Herawati, 2021). Namun pada penelitian ini hanya mencakup di Kecamatan Buleleng saja. Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba meneliti dengan mengambil cakupan kabupaten terluas di Pulau Bali yaitu Kabupaten Buleleng dan menggunakan variabel independen yang berbeda. Penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi, dan Penggunaan Dana BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan jumlah usaha mikro di Kabupaten Buleleng secara signifikan dari tahun ke tahun dan ini menunjukkan bahwa usaha mikro ke depannya akan mengalami persaingan yang ketat sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dari pemilik usaha mikro agar bisa tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan, namun demikian UMKM di Kabupaten belum melakukan inovasi yang signifikan.
2. Sebagian besar pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya masih menggunakan tradisional dan belum dilakukan dengan literasi yang baik.

3. Masih banyak UMKM di Kabupaten Buleleng yang membuat laporan keuangan tidak berdasarkan SAK EMKM yang telah ditetapkan karena kurangnya literasi atau pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan.
4. Sulitnya pelaku UMKM untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan untuk mendapatkan tambahan modal.
5. Tidak tepatnya sasaran pemerintah dalam penyaluran dana BPUM untuk pelaku usaha mikro, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memperoleh BPUM tetapi tidak mempunyai usaha.
6. Kenyataan di lapangan menunjukkan pelaku usaha mikro yang mendapat program BPUM tidak benar-benar membelanjakan untuk menjalankan usahanya, akan tetapi masih menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Adanya fenomena kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng yang belum optimal meskipun dari pemerintah sudah memberikan bantuan berupa dana BPUM untuk membantu usaha-usaha mikro di Kabupaten Buleleng.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dipandang perlu melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih terfokus pada topik yang memang menjadi pokok permasalahan dan untuk menghindari meluasnya permasalahan. Penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh literasi keuangan, inovasi, dan penggunaan dana BPUM di Kabupaten Buleleng terhadap kinerja usaha mikro dengan

inklusi keuangan sebagai variabel moderasi. Inovasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah inovasi produk dan inovasi pemasaran (promosi).

#### **1.4. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun identifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh inovasi terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng melalui moderasi inklusi keuangan?
5. Bagaimana pengaruh inovasi terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng melalui moderasi inklusi keuangan?
6. Bagaimana penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng melalui moderasi inklusi keuangan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh inovasi terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng

3. Untuk Mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng melalui moderasi inklusi keuangan
5. Untuk mengetahui pengaruh inovasi terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng melalui moderasi inklusi keuangan
6. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng melalui moderasi inklusi keuangan

#### **1.6. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Bagi Mahasiswa:**

Hasil penelitian ini untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya terhadap masalah yang terjadi di lapangan serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang diharapkan dapat berguna di kemudian hari. Selain itu, diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai bahan masukan bagi peneliti lain di masa yang akan datang.

##### **2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan bahan pustaka dan sekaligus sebagai masukan dan sumber informasi bagi mahasiswa dan pembaca khususnya mengenai kinerja usaha mikro di Kabupaten Buleleng.

##### **3. Bagi pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masuk Pemerintah mengenai kelangsungan hidup suatu usaha khususnya mikro yang ada di Kabupaten Buleleng.

